

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Wonogiri)



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

ATIK ASTUTI

B200110282

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:
**“DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH (APBD) (STUDI EMPIRIS PADA DPRD KABUPATEN
WONOGIRI)”**

Yang disusun oleh :

ATIK ASTUTI

B 200 110 282

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 31 Maret 2015

Pembimbing



(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)

Mengetahui,

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**DETERMINASI HUBUNGAN PEGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH (APBD)**

(Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Wonogiri)

ATIK ASTUTI

B200110282

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah pada DPRD Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota dewan yang bekerja di DPRD Kabupaten Wonogiri. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh*. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi R^2 .

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, hal ini ditunjukkan oleh nilai p sebesar 0,000 sehingga H_1 diterima dengan taraf signifikansi ($p < 0,05$). Interaksi antara komitmen organisasi, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Sedangkan interaksi antara partisipasi masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci: *Komitmen, Akuntabilitas, Partisipasi, Pengetahuan dewan, dan Pengawasan Keuangan Daerah*

A. PENDAHULUAN

Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Pramita dan Andriyani, 2010).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPR) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, sebab pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdayaguna (Abdul, 2002) dalam (Utami dan Syofyan, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu: (1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi

anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pramono (2002) dalam Isma (2007) dalam (Utami dan Syofyan 2013). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010), perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi penelitiannya. Populasi penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) adalah anggota DPRD Kota dan Kabupaten se-Karesidenan Kedu meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen, sedangkan populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Wonogiri)”**.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi

kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode dan sumber pendapatannya. Definisi anggaran menurut Wildafsky (1975) dalam Arif, dkk. (2002:14) anggaran sebagai catatan masa lalu, rencana masa depan, mekanisme pengalokasian sumber daya, metode untuk pertumbuhan, alat penyaluran pendapatan, mekanisme untuk negosiasi, harapan aspirasi strategi organisasi, satu bentuk kekuatan kontrol, dan alat atau jaringan komunikasi.

Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran baik maka diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengalaman dan pengetahuan dewan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan

kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah anggaran yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Utami dan Syofyan, 2013).

Komitmen Organisasi

Komitmen adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi, sehingga individu “merasa memiliki” organisasinya. Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2013:20).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung (Utami dan Syofyan, 2013).

Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik (Loina, 2003) dalam Utami dan Syofyan (2013).

Hipotesis

- H₁** : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₂** : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₃** : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₄** : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

- H₅** : Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₆** : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₇** : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₈** : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
- H₉** : Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010).

Populasi, Sampel, dan Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD di Kabupaten Wonogiri. Sampel penelitian ini adalah semua anggota dewan di DPRD Kabupaten Wonogiri. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

menggunakan *sampling jenuh*, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2010).

Data dan Sumber Data

Data penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang ditujukan pada responden pada DPRD Kabupaten Wonogiri. Metode survei yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan tertulis melalui kuisisioner yang dibagikan secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner langsung yang dibagikan ke DPRD. Metode kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199).

Variabel Penelitian

Variabel independen: pengetahuan dewan tentang anggaran, variabel dependen: pengawasan dewan pada keuangan daerah, variabel moderating: komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan berbagai tahapan yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji

reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data; uji multikolinearitas; uji heterokedastisitas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi berganda; uji F; uji t; uji koefisiensi determinasi R^2 .

Alat pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis model regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis 1

$$PD = \alpha + \beta_1 PDTA + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

PD = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran

b. Pengujian Hipotesis 2-5

$$PD = \alpha + \beta_1 PDTA + \beta_2 KO + \beta_3 PDTA \times KO + e \dots \dots \dots (2-5)$$

Dimana:

PD = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah

α = Konstanta

PDTA = Pengetahuan dewan tentang anggaran

KO = Komitmen Organisasi

AK = Akuntabilitas

TKP = Transparansi Kebijakan Publik

PM = Partisipasi Masyarakat

$\beta_1 - \beta_9$ = Koefisien Regresi

PDTA dan KO = Interaksi antara PDTA dan KO

D. HASIL PENELITIAN

Uji Kualitas Data

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Metode yang digunakan untuk memberi penilaian terhadap validitas kuesioner adalah korelasi produk momen (*moment product correlation, pearson, pearson correlation*) (Agung, 2010: 89-90). Dalam penelitian ini variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terdapat beberapa item pertanyaan yang tidak valid karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sedangkan variabel akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dan pengawasan dewan semua dinyatakan valid.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari semua variabel adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Hasil perhitungan Kolmogorov-Sminov menunjukkan bahwa signifikasinya adalah sebesar 0,700 , 0,877 , 0,727 , 0,637 ,0,448 dari masing-masing variabel yang berarti signifikansinya diatas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 , berarti menunjukkan bahwa tidak adanya masalah multikolinier dalam model regresi.

c. Uji heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Menggunakan uji glejser dimana dalam penelitian ini hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

a. Analisis regresi berganda

Dari hasil analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$PD = 29,662 + 0,476 (PDTA) \dots\dots\dots (1)$$

$$PD = -133,885 + 3,325 (PDTA) + 9,319 (KO) - 0,162 (PDTA_KO) \dots\dots\dots (2-5)$$

b. Uji signifikan simultan (F)

Berdasarkan uji F, bahwa nilai F hitung memiliki nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah sehingga model regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan dalam analisis.

c. Uji regresi partial (t)

Pengujian hipotesis pertama (H_1) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} 3,954 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi ($0,000 < 0,05$) maka H_1 diterima. Berarti pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Pengujian hipotesis kedua (H_2) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk komitmen organisasi dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah 3,846 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sedangkan untuk pengujian hipotesis ketiga (H_3) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen

organisasi terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar -3,757 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi maka H_2 dan H_3 diterima. Berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Pengujian hipotesis keempat (H_4) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk akuntabilitas terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar 3,223 dengan signifikansi sebesar 0,003, untuk pengujian hipotesis kelima (H_5) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah -3,128 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi maka H_4 dan H_5 diterima. Berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Pengujian hipotesis keenam (H_6) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar 1,786 dengan signifikansi 0,082, sedangkan untuk pengujian hipotesis ketujuh (H_7) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar -1,691 dan

nilai signifikansi sebesar 0,099. Nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi maka H_6 dan H_7 ditolak. Berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Pengujian hipotesis kedelapan (H_8) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar 2,251 dengan signifikansi sebesar 0,030, pengujian hipotesis kesembilan (H_9) dengan analisis regresi linier memperoleh nilai t_{hitung} untuk interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik -2,042 dan nilai signifikansi sebesar 0,048. Nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi maka H_8 dan H_9 diterima. Berarti interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

d. Uji koefisien determinasi (R^2)

Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,254 , 0,444 , 0,397 , 0,310 , 0,368 dari masing-masing variabel yang berarti pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan dan interaksinya mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,954 dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi ($0,000 < 0,05$).
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,757 dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi ($0,001 < 0,05$).
3. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,128 dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi ($0,003 < 0,05$).
4. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,691 dan nilai lebih besar dari signifikansi ($0,099 > 0,05$).
5. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada

keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} 2,042 dan nilai probabilitas lebih kecil dari signifikansi ($0,048 < 0,05$).

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Sehingga, hasil penelitian ini mungkin berbeda jika dilakukan pada DPRD di wilayah lain.
2. Wilayah yang diteliti hanya 1 Kabupaten.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, yaitu:

1. Penelitian berikutnya agar memperluas wilayah sampel penelitian.
2. Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengawasan keuangan daerah, misalnya pengalaman anggota dewan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Wahyu. 2010. *Panduan SPSS 17.0 Untuk Mengolah Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Garailmu.

Arif, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Penerbit Andi.

PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pramita dan Andriyani. 2010. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). *SNAXIII UJSP*. Purwokerto.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ke-15, Penerbit CV.ALVABETA. Bandung.

Utami dan Syofyan. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal WRA*. Vol.1 No.1. UNP. Padang.